

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu kejadian dapat dikatakan sebagai sebuah bencana jika manusia menerima dampak yang merugikan dari fenomena yang terjadi baik fenomena alam maupun bencana non alam¹. Dampak yang diterima bisa berupa korban jiwa, kerusakan materil, penurunan derajat kesehatan sampai ada masalah sosial berupa kerusuhan.

Aktivitas patahan dan gunung api di wilayah Indonesia selain memberikan banyak anugerah sumberdaya alam termasuk kesuburan tanah, juga memberikan sumbangsih pada pembentukan risiko beberapa jenis bencana. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi banyak dipengaruhi oleh aktivitas patahan tektonik. Sedangkan aktivitas gunung api, selain memberikan dampak pada bencana erupsi gunung api, batuan sedimen/endapan yang merupakan hasil dari endapan letusan gunung berapi yang berupa campuran kerikil biasanya tidak memiliki struktur yang kuat sehingga pada lereng yang terjal mudah terjadi longsor.²

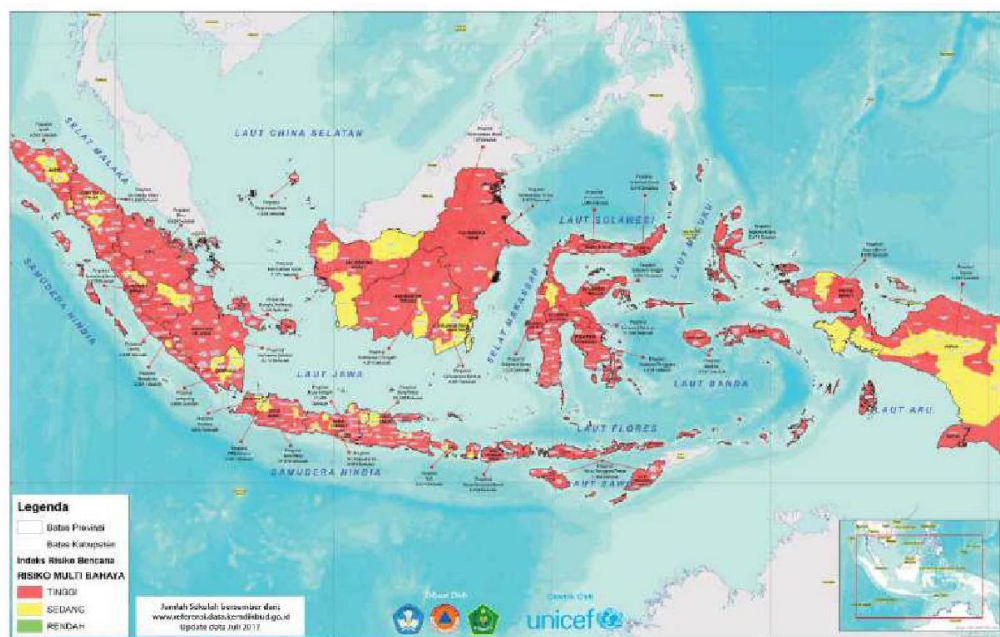
Selain faktor alam yang disebutkan di atas perkembangan dan aktifitas manusia juga menjadi pemicu munculnya potensi bencana. Seperti pembangunan yang terlalu dipacu sampai tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan berdampak pada banjir atau kekeringan. Pengelolaan lingkungan hidup sekitar

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

² Mohd Roby Amry, DKK. Resiko Bencana Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, Hlm 16.

yang berakibat pada wabah baik wabah berupa penyakit atau hama. Pembukaan lahan demi pertambangan atau perkebunan yang memicu kebakaran hutan sampai konflik dengan satwa

Gambar 1.1 Peta Index Risiko Bencana Indonesia



(sumber: Peta Jalan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana)

Pada gambar 1.1 dapat dilihat Indonesia memiliki tingkat rawan bencana yang tinggi. Terutama pada wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Dan Sulawesi berdasarkan tanda warna merah pada gambar.

Beragamnya bencana yang pernah terjadi di Indonesia menandakan bahwa banyaknya ancaman bencana di wilayah Indonesia. Bahkan tidak ada wilayah Indonesia yang tidak memiliki satupun ancaman bencana. Hanya saja bencana yang menjadi ancaman di setiap wilayah berbeda-beda.

Satuan pendidikan, sebagai pusat pembelajaran idealnya menjadi tempat yang aman, namun pada satuan pendidikan juga menjadi menjadi tempat paling rentan jatuhnya korban. Tingkat resiko meningkat diakibatkan kurangnya kesiapsiagaan dan kapasitas satuan pendidikan dalam menghadapi bencana. Selain itu, karena kondisi dari bangunan yang tua atau tidak terawat, pengetahuan dasar kebencanaan seperti evakuasi dan tindakan darurat lainnya yang tidak dimiliki tenaga pendidik dan para murid. Berdasarkan Aliansi Global Untuk Resiko Bencana Di Sektor Pendidikan di seluruh dunia pada rentang tahun 2000 sampai pada 2019 tercatat setidaknya 60 bencana besar yang berdampak pada pendidikan untuk 11 juta anak, selama waktu ini hampir 35.000 anak kehilangan nyawa di lingkungan sekolah dan lebih 30.000 sekolah hancur. Di Indonesia sendiri dalam rentang tahun 2009 sampai dengan 2018 berbagai bencana yang terjadi memberikan dampak pada 62.687 satuan pendidikan dengan lebih dari 12 juta siswa terkena dampak.³

Tingginya tingkat risiko terdampak bencana menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman dari ancaman bencana bagi anak dan warga sekolah lainnya. Adapun upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan level mitigasi bencana di sekolah. Semua pihak harus memiliki perhatian terhadap mitigasi bencana di satuan pendidikan. Tidak adanya pendidikan tentang keamanan di sekolah (*safety education*) oleh satuan pendidikan untuk membekali seluruh unsur yang terdapat di dalamnya khususnya bagi para siswa yang termasuk dalam kategori rentan terhadap

³ Sekretariat Nasional SPAB. 2019. Pendidikan Tangguh Bencana "Mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana Di Indonesia" 15.

bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, baik bencana alam maupun non-alam seperti yang diuraikan di atas memperparah dampak dari kedua bencana tersebut. Pendidikan keamanan di sekolah yang diharapkan mampu menciptakan pengetahuan dan sikap siswa yang terwujud melalui karakter siswa harus banyak didorong untuk terlibat aktif dalam penanggulangan bencana masih belum terlaksana pada satuan pendidikan.

Tabel 1.1 Sekolah Pada Wilayah Rawan Bencana Di Indonesia

No	Bencana	Sekolah Pada Wilayah Rawan
1	Gempa bumi	52.902
2	Tsunami	2.417
3	Gunung meletus	1.685
4	Banjir	54.080
5	Longsor	15.597

Sumber: Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana

Pada tabel 1.1 diperlihatkan jumlah sekolah yang berada di area rawan bencana. Didominasi sekolah yang berlokasi pada wilayah rawan banjir dan gempa bumi.

Dengan ancaman risiko bencana di Indonesia. Satuan pendidikan seharusnya mendapatkan perhatian lebih oleh seluruh pihak yang ada baik pihak sekolah maupun pengawas pendidikan. Terlebih dengan kejadian bencana di Indonesia yang selalu naik setiap tahunnya yang juga berdampak pada sektor pendidikan seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut:

Table 1.2**Data Bencana Dan Fasilitas Pendidikan Terdampak Tahun 2018 -2023**

No	Tahun	Jumlah Bencana	Fasilitas Pendidikan Terdampak
1	2018	3.397	2.984
2	2019	3.814	1.123
3	2020	4.650	713
4	2021	5.402	1.755
5	2022	3.544	1.241
6	2023	5.400	680
Jumlah		26.207	8.496

Sumber: Geoportal Data bencana Indonesia

Dapat diperhatikan pada tabel diatas dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah terjadi sekitar 26.207 bencana yang berdampak pada 8.496 fasilitas pendidikan di Indonesia.

Selain korban jiwa, materil dan psikologis, di bidang pendidikan bencana menjadi penghambat jalannya aktivitas pendidikan dari akibat rusaknya sarana pendidikan seperti gedung sekolah. Pada bencana yang diklasifikasikan sebagai pandemic yang mengakibatkan tenaga pendidik dan peserta didik tidak bisa keluar dari rumah untuk kegiatan belajar mengajar seperti pada Covid-19.

Dalam mengurangi dampak bencana di sektor pendidikan kementerian pendidikan dan budaya mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Budaya Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Program Satuan Pendidikan Aman

Bencana . Sebagai upaya tindakan mitigasi bencana yang diterapkan di lingkungan pendidikan. Satuan pendidikan aman bencana dilaksanakan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari resiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan.⁴

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Budaya Nomor 33 tahun 2019 dijelaskan bahwa penyelenggaraan SPAB memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana.
2. Untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana.
3. Untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana.
4. Untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana.
5. Untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik resiko bencana dan kebutuhan satuan pendidikan.
6. Untuk memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan.
7. Untuk membangun kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan program SPAB.

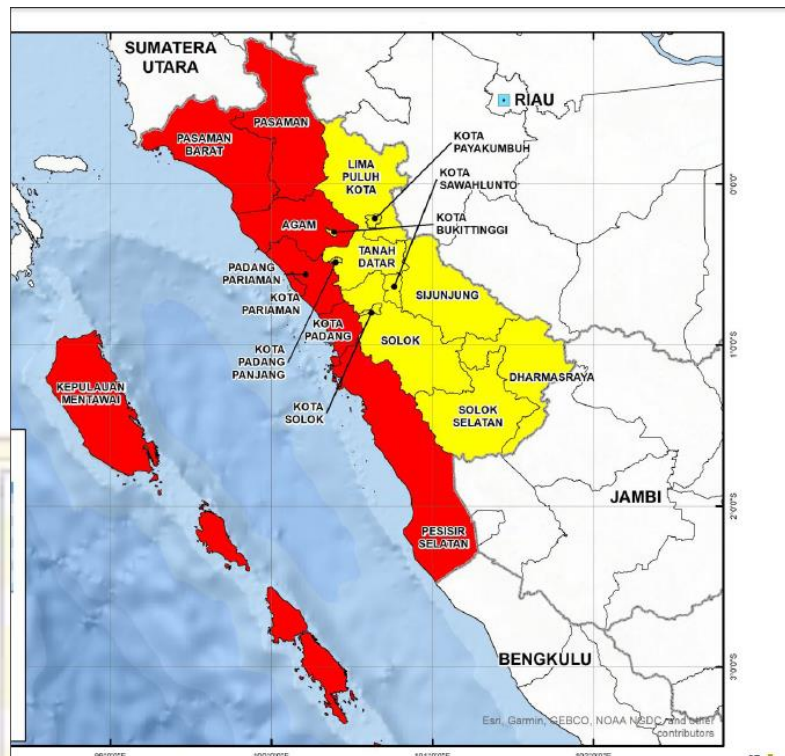
⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Sasaran dari program SPAB adalah seluruh satuan pendidikan di Indonesia dari seluruh satuan pendidikan di Indonesia, termasuk PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SKB/PKBM, dan SLB terutama bagi peserta didik dengan tujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap bencana.

Salah satu provinsi dengan kerentanan tinggi terhadap bencana adalah provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang beribu kota di Kota Padang terletak di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera. Provinsi yang memiliki luas 42.012,89 km² ini memiliki tatanan geologi kompleks karena letaknya berada di daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu Lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan Lempeng Eurasia di bagian utara yang menyebabkan munculnya gejala tektonik yaitu rangkaian pegunungan Bukit Barisan beserta gunung api dan sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng.⁵

Gambar 1.2: Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat

⁵ W. Adi, Asfirmanto, DKK. 2022. Indeks Resiko Bencana Indonesia 2022. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hlm 64.



(sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia)

Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwa ancaman bencana di Sumatera Barat termasuk ancaman bencana yang tinggi.

Tabel 1.3 Persebaran Potensi Bencana di Sumatera Barat

No	Lokasi	Bencana					
		Gempa	Tsunami	Banjir	Kebakaran	Longsor	Gunung Api
1	Kota Padang	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	-
2	Kota Pariaman	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	-
3	Kota Bukittinggi	Potensi	-	-	Potensi	Potensi	Potensi
4	Kota Padang	Potensi	-	-	Potensi	Potensi	Potensi

	Panjang						
5	Kota Payakumbuh	-	-	Potensi	Potensi	-	Potensi
6	Kota Sawahlunto	-	-	-	Potensi	Potensi	-
7	Kota Solok	Potensi	-	Potensi	Potensi	-	-
8	Kab. Padang Pariaman	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
9	KAb. Agam	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
10	Kab. Pasaman Barat	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
11	Kab. Pasaman	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
12	Kab. Lima Puluh Kota	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
13	KAb. Tanah Datar	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
14	Kab. Solok	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
15	Kab. Solok Selatan	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
16	Kab. Pesisir Selatan	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	-
17	Kab. Sijunjung	-	-	Potensi	Potensi	Potensi	-
18	Kab. Dharmasraya	-	-	Potensi	Potensi	Potensi	-
19	Kab. Mentawai	Potensi	Potensi	-	Potensi	Potensi	-

Sumber: BPBD Sumatera Barat, 2011

Pada tabel 1.3 diperlihatkan bahwa Sumatera Barat memiliki semua potensi bencana yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dimana setiap wilayah di Sumatera Barat memiliki lebih dari satu potensi bencana. Di kota Bukittinggi persebaran potensi bencana yang ada baik alam maupun non alam berupa

cuaca ekstrim gempa, tanah longsor, gunung api, kebakaran. Karena berlokasi dekat dengan gunung Marapi serta berlokasi pada patahan Sianok menjadikan potensi bencana yang lebih pada gempa bumi.

Kebakaran lahan yang terjadi di wilayah luar provinsi Sumatera Barat juga menjadi ancaman berupa kabut asap. Kabut Asap kiriman dari kebakaran lahan gambut di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan pada 2019. Disusul peristiwa yang diklasifikasikan sebagai bencana nasional non-alam *Coronavirus Disease (Covid-19)* pada tahun 2020.

Dari tahun 2015 sampai 2022 indeks risiko bencana di Kota Bukittinggi stabil pada rentang angka 128 sampai 130 dengan kelas resiko diklasifikasikan sebagai kelas sedang. Sepanjang 2022 Kota Bukittinggi mengalami kejadian bencana sebanyak 98 kali yang didominasi bencana berupa angin kencang sebanyak 66 kali diikuti banjir sebanyak 28 kali dan longsor sebanyak 4 kali dengan total dampak pada 1 sekolah dan 1 sarana kesehatan.⁶

Kota Bukittinggi yang memiliki morfologi permukaan yang berbukit serta berada pada jalur Patahan sesar Semangko, mengakibatkan kota ini memiliki kerentanan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Kawasan rawan bencana berada sepanjang bibir Ngarai Sianok meliputi tiga kecamatan sebagai berikut:

⁶ Badan Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, Data & Informasi Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, hal III-1

Tabel 1.4 Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor

RAWAN GEMPA BUMI				
NO	ZONA	Kecamatan		
		Aur Birugo Tigo Baleh	Guguk Panjang	Mandiingin Koto Selayan
1	Zona Rawan Tinggi	Belakang Balok Birugo Ladang Cangkiah Kubu Tanjung Pakan Labuah Sapiran Aur Kuning Parit Antang	Kayu Kubu Bukik Cangang Kayu Ramang (BCKR) Pakan Kurai Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS) Tarok Dipo Benteng Pasar Atas Bukit Apit Puhun	Koto Selayan Garegeh Campago G. Bulek Campago Ipuh Kubu Gulai Banchah Puhun Tembok Manggis Ganting Pulai Anak air Puhun Pintu Kabun
RAWAN GONCANGAN TANAH				
1	Zona rawan rendah	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Sapiran Parit Antang Ladang Cangkiah	BCKR Tarok Dipo ATTS Benteng Pasar Atas Bukit Apit Puhun ATTS	Koto Selayan Campago Ipuh Puhun Tembok Puhun Pintu Kabun
2	Zona rawan sedang	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Belakang Balok Sapiran Parit Antang	BCKR Tarok Dipo ATTS Benteng Pasar Atas Bukit Apit Puhun ATTS	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguak Bulek Campago Ipuh Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Banchah
3	Zona rawan tinggi	Birugo Belakang Balok	BCKR Tarok Dipo ATTS Kayu Kubu	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguak Bulek Campago Ipuh

				Puhun Kabun Kubu Banchah	Pintu Gulai
--	--	--	--	-----------------------------------	------------------------

sumber: *Draft Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025.*

Meskipun dengan persebaran bencana yang ada, Kota Bukittinggi memiliki tingkat mitigasi penanggulangan bencana yang belum sempurna atau berjalan maksimal. Faktor yang menghambat mitigasi bencana berupa sarana prasarana dan sumber daya manusia yang belum mumpuni.⁷ Dan juga kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam kesiapan bencana seperti yang diungkapkan pada peneliti pada saat wawancara dengan kepala bagian penanggulangan bencana BPBD Kota Bukittinggi sebagai berikut:

“untuk kesadaran bencana kota bukittinggi sendiri cukup rendah contohnya ada rumah di tempat yang tidak seharusnya diizinkan ada bangunan seperti Di area sianok ada bangunan yang hanya berjarak 10 meter dari bibir tebing padahal seharusnya jarak bangunan dari bibir tebing itu minimal sekitar 100 meter.” (wawancara dengan Iben Achsan Kepala Bagian Penanggulangan Bencana BPBD Kota Bukittinggi pada tanggal 07 oktober 2025 pukul 09.00)

Dalam pelaksanaan Program SPAB di Kota Bukittinggi, terdapat beberapa aktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan program ini. Berikut aktor yang terlibat:

1. Aktor dalam lingkungan satuan pendidikan.

⁷ Poppy Zahratulfadhillah & Febri yuliani, “Implementasi PENanggulangan Bencana Gempa Bumi Di Kota Bukittinggi”(2024) 3:3, Journal Of Research and Development on Public Policy, Hal 199-207

- a. Pimpinan sekolah sebagai pemimpin dalam implementasi SPAB, bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program SPAB di sekolah.
 - b. Guru bertugas dalam memberikan pendidikan kebencanaan, mengintegrasikan materi tentang kebencanaan dalam pembelajaran serta membimbing peserta didik dalam pelatihan kebencanaan.
 - c. Peserta didik yang menjadi target utama dari program satuan pendidikan aman bencana.
2. Aktor di luar lingkungan satuan pendidikan
- a. Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi bertugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan , dan evaluasi program SPAB di Kota Bukittinggi sampai Sekretariat bersama dibentuk
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi bertugas dalam melaksanakan sosialisasi SPAB serta pelatihan tanggap bencana di sekolah yang ada di Kota Bukittinggi.
 - c. Organisasi relawan kebencanaan bertugas dalam memberikan informasi kebencanaan yang ada di sekitar area sekolah.

Pelaksanaan Satuan pendidikan aman bencana di Kota Bukittinggi sendiri sejauh ini masih sebatas sosialisasi tentang kebencanaan di sekolah-sekolah pada peserta didik. Padahal selain sosialisasi tindakan seperti pengecekan kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana juga harus dilaksanakan dengan inspeksi keadaan bangunan sekolah, ketersediaan alat seperti racun api, keberadaan jalur evakuasi dan titik kumpul saat terjadi bencana, serta keberadaan hal yang

mengancam keselamatan warga sekolah pada saat terjadi bencana seperti pohon besar.

Pelaksanaan SPAB saat ini masih terbatas pada beberapa sekolah saja di kota Bukittinggi dan belum mencakup seluruh sekolah di setiap jenjang pendidikan. akibatnya tenaga pendidik di beberapa sekolah belum memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Penyebabnya kurangnya pelatihan yang diberikan secara khusus untuk tenaga pendidik dan non pendidik secara intensif. Juga pembelajaran dalam kebencanaan di sekolah saat ini masih sebatas ekstrakurikuler seperti pramuka dan palang merah pelajar belum ada di dalam kurikulum. Hal ini diungkapkan pada peneliti saat wawancara dengan Sekretaris Pelaksana BPBD Kota Bukittinggi

“Untuk kerjasama di sektor pendidikan langsung secara umum di bidang ekstrakurikuler seperti pramuka dan palang merah, belum ada di kurikulum pendidikan karena kami belum menerima panggilan untuk kurikulum sendiri. (wawancara dengan Iqbal Meldi SE, MM Sekretaris Pelaksana BPBD Kota Bukittinggi pada tanggal 25 oktober 2024 pukul 09.00)

Pelaksanaan satuan pendidikan aman bencana di kota Bukittinggi dilaksanakan oleh pihak badan penanggulangan bencana daerah kota Bukittinggi yang bekerja sama dengan dinas pendidikan. implementasi satuan pendidikan aman bencana terlihat dibebankan secara penuh pada BPBD kota Bukittinggi dan sekolah pasti terbebani pada keterbatasan sumber daya. Belum lagi kewenangan yang dimiliki oleh badan penanggulangan bencana di sektor pendidikan yang tidak banyak. Pelaksanaan satuan pendidikan aman bencana kota Bukittinggi

pendidikan pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Itupun pelaksanaannya masih dalam kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan dimana belum mencakup keseluruhan sekolah. Pelatihan tidak dilaksanakan secara terjadwal oleh pihak BPBD Kota Bukittinggi atau dinas pendidikan kota Bukittinggi, akan tetapi pelatihan dilaksanakan jika pihak sekolah meminta pelatihan untuk dilakukan. Seperti yang diungkapkan sekretaris pelaksana BPBD kota Bukittinggi sebagai berikut:

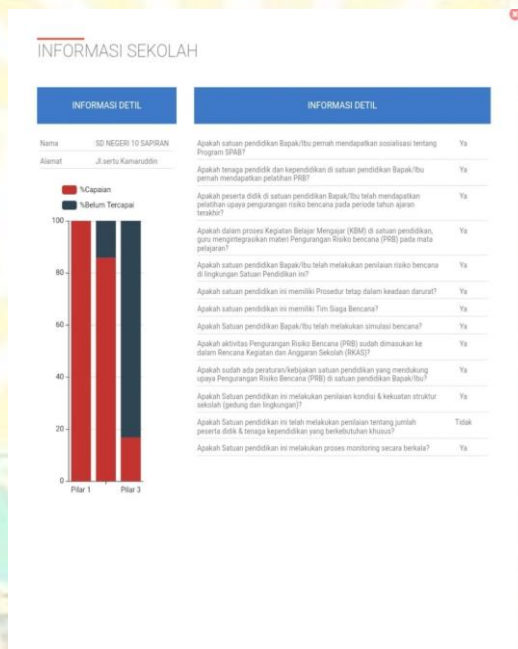
“Untuk pelatihan tidak dijadwalkan, kami melaksanakan pelatihan jika ada permintaan sekolah dan saat ini belum pernah terjadwal, tapi pelatihan ini setiap tahun pasti ada. Kendalanya ada pada waktu yang dimiliki pihak sekolah.”
(wawancara dengan Iqbal Meldi SE, MM Sekretaris Pelaksana BPBD Kota Bukittinggi pada tanggal 15 oktober 2024 jam 09.00)

Salah satu sekolah yang telah menjalankan program ini adalah SDN 10 Sapiran di kota Bukittinggi. SDN sapiran kota bukittinggi sendiri telah menjadi perwakilan dalam workshop SPAB pada tingkat provinsi yang dilaksanakan di kota Padang. Dan juga menjadi sekolah yang telah terlebih dahulu dalam menjalankan program ini dibuktikan dengan dilaksanakannya bimtek serta monitoring dan evaluasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 17

November 2020.⁸ Serta dibentuknya BOSINA (Bovah Siaga Bencana) pada Agustus 2023.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya SDn 10 sapiran masih belum secara penuh melaksanakan SPAB berdasarkan tiga pilar satuan pendidikan aman bencana seperti yang telah dilaporkan melalui Inarisk milik BNPB.

Gambar 1.3 Progres Pelaksanaan SPAB



Sumber: Inarisk2.bnpb.go.id

Kondisi lingkungan sekolah yang tidak sepenuhnya aman pada saat terjadinya bencana seperti pohon yang terlalu condong mengarah ke ruang kelas, atau pohon besar yang berada tepat di samping ruang kelas. Selain itu juga

⁸ Muttmainnah, Lilis Siti. 21 november 2020. BNPB Lakukan Monitoring Evaluasi tindak Lanjut Bimtek Fasilitator SPAB, www.BNPB.go.id/index.php/berita/BNPB%20Lakukan%20Monitoring%20Evaluasi%20Tindak%20Lanjut%20Bimtek%20Fasilitator%20SPAB. Diakses pada 25 April 2023

terlihat bahwa jalan menuju lokasi evakuasi pada saat darurat kebencanaan yang terhalangi taman bunga yang ada di depan bangunan sekolah.

Gambar 1.4 Pohon Yang Mengarah Ke Ruang Kelas



Sumber: dokumentasi peneliti

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DI KOTA BUKITTINGGI (STUDI DI SDN 10 SAPIRAN.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya dapat menarik beberapa permasalahan yang muncul berkaitan implementasi program SPAB di sekolah sekitar kota bukittinggi. “bagaimana implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana di SDN 10 Sapiran?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian , tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana di SDN 10 Sapiran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Administrasi Publik karena terdapat kajian-kajian administrasi Publik terutama pada bidang konsentrasi Kebijakan publik tentang implementasi kebijakan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang relevan untuk penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang ada pada penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa kajian yang dapat digunakan sebagai saran ataupun masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam pengimplementasian penyelenggaraan program Satuan Pendidikan AmanBencana.